

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN
PERDAMAIAN KONFLIK-KONFLIK DI KAWASAN TIMUR
TENGAH
(2010-2017)**

Ahmad Iqmal

20130510300

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY, Jalan Lingkar
Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI.Yogyakarta 22183

Email:

iqmalahmad25@gmail.com

ABSTRAKSI

Jurnal ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merespon konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah serta partisipasi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kedamaian di kawasan tersebut. Hingga saat ini konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian bagi banyak negara di dunia, seperti halnya konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun dan sampai saat ini belum menemui titik perdamaian merupakan salah satu alasan tersebut. Berbagai konflik lainnya juga sempat membuat negara-negara di dunia khawatir dengan stabilitas keamanan kawasan tersebut akan memburuk, seperti konflik Suriah, krisis diplomatik Qatar, dan konflik Arab Saudi – Iran. Sebagai salah satu negara yang memiliki kedekatan dengan negara-negara yang berselisih, pemerintah Indonesia turut berpartisipasi serta mengambil peran untuk membantu mewujudkan kedamaian dalam konflik yang

terjadi, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu bentuk pengamalan dari politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas-aktif. Dalam hal ini penulis menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam keterlibatannya untuk membantu mendamaikan permasalahan yang terjadi dengan proses *pra-negosiasi*. Proses *pra-negosiasi* tersebut menggunakan model menurut Janice Gross Stein. Analisis mengarah kepada bagaimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik agar mau menyelesaikan dengan cara diplomasi.

Kata kunci: *pra-negosiasi*, konflik, kebijakan Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dan Timur Tengah memiliki hubungan yang dekat dengan sejarah yang panjang. Sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka, kedekatan telah terjalin baik dengan negara-negara di Timur Tengah. Saat itu banyak pemuda-pemuda muslim dari Indonesia yang pergi ke Mesir untuk belajar di Al-Azhar. Mahasiswa Indonesia disana juga mengenalkan dan memperjuangkan Indonesia dengan memberitakan tentang penjajahan yang terjadi di Indonesia. Berkat hal ini ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Mesir menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia (Kemenlu Indonesia). Selain itu kegiatan haji yang dilakukan oleh umat muslim Indonesia ke tanah suci Mekkah juga menjadi salah satu faktor terjalinnya kedekatan Indonesia dengan Arab Saudi saat itu. Berkat hal ini Arab Saudi menyadari mayoritas muslim Indonesia dan juga kebangkitan Islam.

Setelah menjadi negara merdeka, Indonesia aktif dalam memperjuangkan hak-hak umat muslim di kawasan Timur Tengah. Kawasan ini juga menjadi pusat perhatian karena terjadinya banyak konflik-konflik di negara-negara dalam kawasan tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab atau faktor terjadinya konflik di kawasan ini, seperti minyak, air tawar, hingga agama. Minyak saat ini merupakan bahan energi utama yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Sebagai sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui membuat minyak menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dapat memicu konflik. Selain minyak, air tawar juga menjadi sumber konflik di Timur Tengah. Air tawar bisa berupa sungai, danau, sumber mata air maupun air bawa tanah. Karena wilayahnya yang dipenuhi padang pasir dan terdapat sedikit sekali sumber air membuatnya menjadi sesuatu yang berharga (Jatmika, 2014).

Selain konflik antara Israel – Palestina, ada banyak lagi dukungan serta bantuan Indonesia dalam konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Salah satunya adalah konflik Arab-Iran. Konflik ini memanasi setelah Arab Saudi menghukum mati terhadap Nimr Al Nimr pada 2 Januari 2016 (BBC, 2016). Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dalam merespon konflik yang terjadi dan mendapat respon positif dari kedua negara tersebut

Seperti konflik yang terjadi di Suriah, Libanon, Yaman, dan kawasan lainnya. Bantuan yang Indonesia berikan terhadap daerah-daerah tersebut meliputi berbagai aspek, baik dukungan dalam mengajak negara-negara di dunia untuk memberi

perhatian dan bantuan, bantuan ekonomi hingga bantuan kemanusiaan. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah menjalankan politik luar negerinya yang bebas-aktif, dengan menunjukkan aktifnya peran Indonesia dalam membantu meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

II. KERANGKA TEORITIK

1. Konflik

Konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah tidak hanya konflik yang meliputi antara negara saja namun juga ada konflik yang terjadi karena perbedaan ideologi hingga terorisme. Untuk itu penulis akan mendefinisikan terlebih dahulu tentang pengertian dan bentuk-bentuk konflik yang ada di dunia internasional.

Secara umum pengertian konflik adalah pertentangan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih disebabkan oleh perbedaan yang mana membuat pihak-pihak bersangkutan berusaha untuk memaksakan keinginannya terhadap pihak lainnya. Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses dimana suatu pihak merasa dirugikan dan pihak tersebut telah memberikan efek negatif kepada pihak lainnya. Menurut Gibson hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Sedangkan menurut Alabanness, konflik adalah sebuah keadaan

dimana antara pihak yang bermasalah tidak mencapai tujuan dan kesepakatan yang ada sehingga hal ini bisa mencampuri urusan masing-masing pihak (Kompasiana, 2016).

Dalam dunia internasional konflik terbagi menjadi menjadi beberapa macam. Konflik berbeda-beda tergantung pada analisis konfliknya, menurut Oliver Ramsbotham macam-macam konflik terdapat dua yaitu konflik interstate dan konflik intrastate. Konflik interstate merupakan konflik antar negara yang memiliki perbedaan kepentingan, misalnya sistem ekonomi, sedangkan konflik intrastate merupakan konflik yang terjadi di dalam negara. (Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall, 2005)

B. Proses Pranegosiasi Internasional

Teori berujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Selain itu, dalam ilmu sosial, teori memiliki dua fungsi. Pertama, teori berfungsi secara mudah bagi peneliti untuk mengorganisasikan data. Kedua, teori memungkinkan peneliti mengembangkan prediksi bagi situasi-situasi yang belum ada datanya. Prediksi membawa kepada hipotesis yang menjadikan tindakan penelitian lebih terarah, efisien, dan sistematis

Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu terkait bagaimana langkah yang diambil Indonesia dalam usaha mendamaikan konflik-konflik di Timur Tengah. Penulis akan menggunakan teori tentang Proses

Pranegosiasi Internasional dari Janice Gross Stein sebagai teori dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

Sebelum masuk dalam pengertian tentang Pranegosiasi penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan atau tidak menggunakan pihak ketiga yaitu negosiator untuk mencapai sebuah kepentingan tertentu. Menurut Zartman dan Berman negosiasi merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan antar negara atau pihak. Kemudian menurut Fisher dan Ury negosiasi merupakan sebuah proses persetujuan yang juga untuk menguntungkan setiap pihak yang ada didalamnya. Hal tersebut dilakukan melalui interaksi, komunikasi, dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses negosiasi hingga selesai. Di tahap awal ada yang disebut Pranegosiasi (Pre-negotiations). Pada umumnya Pranegosiasi merupakan tahap awal sebelum terjadinya negosiasi diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Proses Pranegosiasi dimulai ketika satu atau dua pihak telah mempertimbangkan negosiasi sebagai salah satu kebijakan sebagai jalan keluar serta membicarakan tentang tujuan ini terhadap pihak lainnya. Proses Pranegosiasi berakhir ketika pihak-pihak yang bersangkutan bersedia untuk lanjut ke tahap negosiasi atau ketika salah satu pihak mengabaikan negosiasi dengan menganggapnya sebagai bukan kebijakan yang tepat (Stein, 1989).

Sebelumnya banyak dari negosiasi dalam konflik internasional yang mulai mencari faktor penentu dan hambatan untuk mencapai kesepakatan diantara para pihak yang berkepentingan dalam proses negosiasi tersebut. Namun saat ini pentingnya untuk mencari tahu tentang kondisi dan proses seperti apa yang diperlukan untuk membuat pihak-pihak yang terlibat berani untuk mempertimbangkan agar bernegosiasi. Dalam tulisannya Janice mengungkapkan bahwa proses Pranegosiasi merupakan tahap yang penting, dalam tulisannya tersebut disebutkan bahwa jika tahap ini tidak sukses maka negosiasi tidak akan tercapai. Jika tahap pranegosiasi tersebut berhasil, maka hal tersebut akan berdampak terhadap negosiasi yang akan dilakukan. Dampak tersebut akan dirasakan jika saat tahap pranegosiasi tersebut menjelaskan tentang apa yang akan dibahas serta mengatur agenda negosiasi yang akan dilakukan (Stein, 1989).

Dalam beberapa waktu tertentu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pranegosiasi, sudah beranggapan bahwa pranegosiasi tersebut tidak akan berujung pada negosiasi, namun dalam prosesnya terkadang pihak-pihak tersebut akan mendapatkan manfaat penting yang bahkan tidak berhubungan tujuan hasil negosiasi itu sendiri. Dalam konflik yang berkepanjangan dan rumit, pranegosiasi menjadi sangat penting dalam mengarahkan negosiasi pada jalur yang tepat (Stein, 1989).

Tahap pranegosiasi berbeda dengan proses negosiasi yang merupakan tahapan berikutnya. Pada waktu tertentu kedua proses ini yaitu pranegosiasi dan negosiasi terkadang terjadi secara bersamaan atau tumpang tindih. Jika tahap pranegosiasi

berjalan secara sukses, pihak-pihak yang terkait akan mendiskusikan salah satu permasalahan dan secara bersamaan memungkinkan adanya perluasan dalam pembahasan dan penambahan agenda serta membuat jadwal tambahan untuk negosiasi yang lainnya. Dalam waktu tersebut pihak-pihak yang bernegosiasi akan bergerak maju mundur dalam prosesnya. Ketika pihak-pihak yang berkonflik yang dalam proses negosiasi menghadapi beberapa hambatan serius, kemudian negosiasi akan ditunda menurut keinginan pihak-pihak yang terkait dan hal tersebut akan kembali lagi ke tahap pranegosiasi untuk mempertimbangkan negosiasi lainnya dengan format dan opsi yang berbeda (Stein, 1989).

Proses pranegosiasi sebagian besar terkonstrasi dalam dua aspek yang dinilai dari efek proses tawar-menawar setelahnya. Kedua aspek tersebut yang berdampak terhadap negosiasi adalah pemebentukan agenda dan posisi. Dalam pembentukan agenda, pihak ketiga atau negosiator akan memberikan ‘protective contracts’ yang mana selama dalam proses tersebut untuk memastikan bahwa setiap pihak yang bersangkutan mendapatkan penawaran baik yang dihasilkan dari negosiasi. Sedangkan untuk pembentukan posisi hal tersebut dampak dalam negosiasi tersebut difokuskan pada taktik, permasalahan dan nilai terhadap negosiasi yang berikutnya (Stein, 1989).

Dalam melaksanakan politik luar negerinya, Indonesia memiliki landasan yang terdapat dalam pembukaaan Undang Undang Dasar 1945. Salah satu inti yang tersirat didalamnya adalah Indonesia akan turut serta dalam mewujudkan permdaian di dunia.

Hal ini dipraktikkan oleh Indonesia didalam setiap konflik yang terjadi dalam dunia internasional termasuk juga Timur Tengah.

Indonesia merupakan negara yang memilki politik luar negeri Bebas-Aktif, yang mana dalam proses kebijakan yang dihasilkan Indonesia tidak memihak salah satu kelompok tertentu dalam konflik yang terjadi, kemudian Indonesia juga akan aktif memainkan peranya dalam prosesnya (Leifer, 1983). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Indonesia dalam menyikapi konflik yang terjadi di Timur Tengah, baik konflik yang terjadi antara Arab Saudi – Iran, Arab Saudi – Qatar, dan Suriah, Indonesia tidak memihak salah satu dari negara atau pihak tertentu dalam konflik yang terjadi.

III. PEMBAHASAN

Sebagai bentuk dari pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu Bebas-Aktif menuntut peran aktif Indonesia dalam dunia internasional. Salah satu kebijakan luar negeri yang Indonesia terapkan adalah berperan aktif dalam mendamaikan konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam pembukaan UUD1945 yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesial. Peran yang dilakukan oleh Indonesia dalam konflik Arab Saudi – Iran, Arab Saudi – Qatar, dan Suriah merupakan bentuk dari usaha Indonesia mendamaikan pihak-pihak yang terlibat. Dalam tulisan Janice “Getting to The Table” usaha fasilitasi yang dilakukan Indonesia dalam mendamaikan konflik tersebut termasuk dalam bagian dari proses pranegosiasi. Janice mengungkapkan bahwa ini merupakan proses penting karena akan berpengaruh terhadap negosiasi jika terjadi.

Dalam menjelaskan upaya yang dilakukan Indonesia dalam mendamaikan konflik-konflik tersebut penulis akan membaginya dalam dua bagian sesuai dengan

apa yang dilakukan oleh Indonesia. Tahap pertama merupakan upaya yang dilakukan Indonesia dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Tahap kedua dalam konflik tersebut Indonesia berusaha untuk mencari alternatif penyelesaian konflik yang terjadi.

A. Upaya Indonesia untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik

Dalam tahap pranegosiasi pada konflik internasional terdapat berbagai proses untuk menuju ke tahap berikutnya yaitu negosiasi. Salah satu tahapan awal dalam proses pranegosiasi tersebut ialah menjalin komunikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Proses komunikasi ini dapat dilakukan langsung melalui pihak yang berkonflik atau melalui pihak ketiga. Pada tahap ini terdapat tujuan untuk mengajak pihak-pihak yang terlibat agar memilih jalur negosiasi sebagai solusi dalam penyelesaian konflik. Sehingga komunikasi menjadi salah satu tahapan pertama yang penting karena dengan terjalinnya komunikasi oleh pihak-pihak yang berkonflik membuat proses penyelesaian konflik tersebut dapat berjalan baik.

Dalam konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah seperti konflik Arab Saudi-Iran, Qatar, serta Suriah juga melalui proses komunikasi ini. Proses pranegosiasi dianggap telah dimulai jika salah satu atau pihak yang lain terlibat dalam konflik tersebut bersedia atau memilih negosiasi sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini merupakan sebagai salah satu bentuk dari menjalin komunikasi. Tentunya dalam proses tersebut bisa saja pihak-pihak yang terlibat dapat menyatakan pernyataan tersebut secara langsung satu sama lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat menyampaikan hal tersebut melalui pihak ketiga seperti yang terjadi dalam konflik Arab Saudi dan Iran.

Konflik Arab Saudi dan Iran merupakan konflik berkepanjangan yang sering mengalami pasang surut dalam perseteruannya. Pada tahun 2016 lalu hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran kembali memanas setelah Arab Saudi menghukum mati terhadap Nimr Al Nimr pada 2 Januari 2016. Tindakan yang diambil oleh Arab Saudi tersebut memicu kemarahan yang terjadi di Iran. Menyikapi hal tersebut Arab Saudi secara langsung memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan menarik kembali diplomat-diplomat yang berada di Iran, serta dilanjutkan dengan pengusiran diplomat Iran.

Eskalasi konflik yang terjadi secara cepat ini direspon dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Langkah awal yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi konflik tersebut ialah menghubungi Sekjen OKI, Menlu Kerajaan Arab Saudi, dan Menlu Republik Islam Iran untuk berunding dan mencari solusi yang baik secara damai, kemudian pada tanggal 12 Januari 2016 Indonesia menugaskan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menyampaikan surat khusus kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Presiden Iran Hassan Rouhani (Azra, 2016).

Dalam kunjungan lanjutan yang dilakukan Indonesia ke Arab Saudi sebagai rangka usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, Raja Salman secara langsung menyambut kedatangan tersebut dan juga menghargai langkah Indonesia sebagai negara pertama yang menyampaikan kesiapan untuk membantu terus terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia ini merupakan bentuk dari kepedulian dan keseriusannya untuk terlibat dalam membantu untuk menenangkan situasi yang terjadi serta mewujudkan perdamaian.

Langkah yang dilakukan Indonesia ini merupakan salah satu cara untuk membuat kedua belah pihak yaitu Arab Saudi dan Iran agar berkomunikasi satu sama lainnya dengan harapan konflik yang terjadi agar segera mereda. Setelah melakukan komunikasi terhadap kedua belah pihak, langkah selanjutnya yang dilakukan Indonesia adalah menawarkan diri sebagai mediator jika negosiasi dapat terwujud.

Hal ini mendapatkan apresiasi baik oleh Arab Saudi dan Iran terhadap kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian konflik tersebut. Dukungan tersebut dapat dinyatakan oleh Presiden Iran yaitu Hassan Rouhani yang beranggapan bahwa hubungan dengan Arab Saudi perlu diperbaiki karena jika terus berlanjut akan mengganggu kestabilan kawasan Timur Tengah. memiliki tujuan untuk menstabilkan kawasan Timur Tengah. Sebagai dua negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut konflik yang terjadi dengan Arab Saudi dapat berimbas ke negara sekitarnya dan membuat kawasan tersebut tidak stabil. Arab Saudi juga mendukung untuk terjadinya negosiasi yang ditawarkan oleh Indonesia, namun pihak Arab Saudi mengatakan bahwa mereka siap untuk berdiskusi dan damai dengan Iran jika Iran bersedia menghormati dan berhenti “campur tangan” dalam urusan Arab Saudi. Arab Saudi beranggapan bahwa eksekusi mati terhadap Nimr al-Nimr yang dilakukannya merupakan urusan dalam negerinya. (Kemenlu Indonesia, 2016)

Berdasarkan dengan apa yang disebutkan oleh Janice bahwa proses pranegosiasi dimulai ketika salah satu atau kedua belah pihak memilih negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik. Dalam konflik Arab Saudi dan Iran ini dapat dikatakan bahwa telah memasuki tahap pranegosiasi. Indonesia yang memiliki posisi sebagai pihak ketiga dalam konflik tersebut berperan penting karena mampu menghubungkan serta mengajak untuk melakukan negosiasi. Meskipun kedua belah pihak setuju untuk melakukan negosiasi namun hal tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan, karena salah satu pihak mengajukan persyaratan terhadap pihak lainnya agar terwujudnya negosiasi.

Janice menyebutkan proses pranegosiasi merupakan sesuatu yang penting dan memiliki dampak terhadap proses yang terjadi setelahnya yaitu negosiasi. Namun sebelum negosiasi tersebut, pranegosiasi juga berdampak dalam mengagendakan apa yang dibicarakan. Dalam tahap ini pihak-pihak yang terkait akan mengajukan yang disebut ‘protective contracts’ dengan tujuan agar jika negosiasi terjadi maka kedua

belah pihak akan saling mendapatkan keuntungan. Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Arab Saudi dan Iran dapat dikatakan bahwa jika negosiasi dilakukan kedua belah pihak tidak dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, maka hingga saat ini belum ada negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 5 Juni 2017 Arab Saudi melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Krisis ini konflik terjadi karena Arab Saudi menganggap Qatar menjalin hubungan dekat dengan Iran serta diduga mendukung kegiatan terorisme. Pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi tersebut dilanjutkan dengan berbagai larangan yang diberikan kepada Qatar, seperti memerintah warga negaranya untuk pergi dari Qatar, meminta warga negara Qatar yang berada di negaranya untuk segera pulang, hingga larangan lainnya untuk berhubungan dengan Qatar. Krisis ini juga semakin memuncak ketika aliansi dari Arab Saudi seperti Uni Emirat Arab, Mesir dan beberapa negara lainnya yang memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar serta memberlakukan larangan yang serupa.

Dalam krisis diplomatik yang terjadi, Indonesia tidak mengikuti langkah yang diambil oleh negara-negara aliansi dari Arab Saudi tersebut. Ketika konflik tersebut terjadi Menlu Retno melakukan kunjungan ke Doha. Kunjungan ini dilakukan untuk menghubungi menlu yang berada di kawasan Timur Tengah untuk membahas perkembangan konflik tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhamad Basri Sidehabi memberikan pernyataan bahwa Indonesia prihatin dengan situasi yang terjadi. Kemudian Indonesia mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dalam memerangi terorisme dan berkontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta global. Dalam pernyataan tersebut juga disampaikan bahwa Indonesia berharap semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dapat lebih menahan diri dan mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara berdialog (Muhaimin, n.d.).

Dalam kesempatan lain Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla juga memberikan pernyataan bahwa akan mempelajari lebih jauh lagi tentang permasalahan yang terjadi. Selain itu Indonesia juga akan bersikap netral dalam konflik dan berharap pihak-pihak yang terkait tidak menggunakan jalan kekerasan sebagai penyelesaian dan menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Respon Indonesia yang netral terhadap krisis diplomatik Qatar tersebut membuat Uni Emirat Arab (UEA) memperhitungkan peran Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari utusan UEA yang dikirim ke Indonesia untuk membahas hal ini. Utusan tersebut bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, utusan tersebut menyampaikan bahwa UEA menilai Indonesia memiliki kapabilitas yang bagus karena berhubungan dengan baik terhadap pihak-pihak yang terlibat, selain itu Indonesia juga posisinya dinilai seimbang dalam politik luar negerinya dan dinilai selalu ingin memberikan kontribusi dalam terciptanya perdamaian dunia. Dalam pertemuan tersebut utusan UEA juga menyampaikan bahwa menyetujui opsi yang ditawarkan oleh Indonesia tentang penyelesaian konflik melalui jalur dialog dan secara politik yang merupakan opsi terbaik (Kemenlu Indonesia, 2017).

Berbeda dengan konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran, dalam krisis Qatar negara yang berkonflik saling berkomunikasi untuk mencapai penyelesaian yang terjadi. Kedua belah pihak baik Qatar serta Arab Saudi dan aliansinya bersedia untuk melakukan mediasi. Tidak berbeda dengan sebelumnya, Arab Saudi mengajukan syarat sebelumnya melaksanakan negosiasi untuk berdamai dengan Qatar. Syarat-syarat tersebut berjumlah 13 butir yang disebut sebagai ultimatum, berikut adalah 13 syarat yang Arab Saudi berikan:

Banyak dari syarat tersebut dimaksudkan untuk memangkas kedaulatan negara Qatar, membungkam kebebasan berbicara, serta menerapkan audit dan mekanisme masa percobaan untuk Qatar. Kemudian Menteri Luar Negeri Qatar Syekh Mohammed bin Abdulrahman al Thani menyatakan bahwa daftar permintaan

yang diserahkan pada 22 Juni itu sengaja dibuat sedemikian rupa agar ditolak Qatar. Dengan adanya penolakan dari Qatar tidak berujung pada negosiasi.

Posisi Indonesia dalam konflik ini belum mendapatkan peran yang besar meskipun dianggap mampu oleh UEA untuk menjadi mediator, namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengambil keputusan agar tidak terburu-buru untuk mengusulkan Indonesia menjadi penengah dalam krisis tersebut. Butuh sosok yang disegani di kawasan Timur Tengah untuk bisa menjadi mediator. Namun, Retno tidak menutup pintu jika negara-negara Timur Tengah itu membutuhkan bantuan Indonesia. Serta dalam kunjungan yang dilakukan oleh wakil dari UEA kedua menteri sepakat bahwa upaya mediasi yang tengah dilakukan oleh Kuwait adalah langkah terbaik. Retno juga mengatakan bahwa Kuwait sejauh ini sudah dapat memenuhi kualitas untuk menjadi mediator negara-negara yang terlibat konflik di kawasan tersebut. Belum lagi pengalaman mediasi yang dilakukan Kuwait pada 2013-2014 lalu yang menjadikan negara itu, dipandang oleh negara sekitarnya. Indonesia juga berharap apa yang ditawarkan oleh Kuwait dapat didukung oleh negara-negara inti yang ada di kawasan teluk, juga kepada negara eropa yang berkepentingan dengan hubungan tersebut.

Konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah Suriah. Kekecewaan masyarakat terhadap Bashar Al-Assad dengan banyak kebijakannya yang menyulitkan mayoritas masyarakat membuatnya banyak mendapatkan kritik. Hal tersebut memuncak setelah terjadinya Arab Spring yang memberanikan masyarakat untuk melawan perlakuan yang selama ini dilakukan oleh Bashar Al-Assad terhadap mereka. Dimulai dari demonstrasi yang dilakukan diberbagai kota kemudian berujung pada pecahnya perang senjata antara pihak militer dengan masyarakat Suriah yang bergabung dan membentuk kelompok militer.

Dalam konflik Suriah Indonesia mengambil langkah untuk terwujudnya perdamaian dengan cara menyarankan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk tetap tenang dan mengambil langkah diplomasi sebagai jalan untuk perdamaian. Langkah tersebut dilakukan oleh Indonesia setelah Amerika Serikat meluncurkan 59 rudal Tomahawk ke pangkalan udara Suriah yang menyebabkan enam tentara militer rezim pemerintahan Bashar Al-Assad tewas.

Pemerintah Indonesia menunjukkan kekecewaannya terhadap pihak Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa serangan rudal Tomahawk yang dilakukan oleh AS ke Suriah merenggut banyak korban jiwa, dan mengetuk aksi tersebut yang merupakan aksi unilateral. Pihak AS menyatakan bahwa hal tersebut dilakukannya sebagai respon serangan senjata kimia yang dilakukan oleh kelompok Bashar Al-Assad meskipun pemerintah menyangkal melakukan hal tersebut (Yuniati, 2017).

Posisi Indonesia sangat mengutuk penggunaan senjata kimia yang memakan banyak korban, terutama warga sipil yang tidak bersalah dalam perang tersebut. Pada saat yang sama, Indonesia prihatin serangan unilateral dari pihak manapun. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Indonesia tidak berada di pihak Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi. Namun Indonesia tidak hanya kecewa terhadap tindakan AS yang secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Dewan Keamanan PBB tersebut, Indonesia juga menyayangkan penggunaan gas sarin oleh pemerintah Suriah yang menewaskan 80 warga sipil di Kota Khan Sheikhun, Provinsi Idlib, Suriah (Fatmawati, 2017).

Dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa posisi Indonesia tidak memihak salah satu pihak tertentu dalam konflik yang terjadi. Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri juga memberikan kecaman keras terhadap penggunaan senjata kimia oleh pihak manapun. Selain itu pemerintah Indonesia juga meminta semua pihak yang terlibat agar dapat menghormati nilai dan hukum internasional, khususnya piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) mengenai keamanan dan perdamaian internasional. Indonesia juga menyerukan bahwa perang bukanlah solusi dalam konflik di Suriah. Oleh sebab itu, pemerintah menyerukan agar konflik ini diselesaikan dengan jalan dialog.

B. Usaha Indonesia dalam mencari alternatif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi

Peran aktif yang dilakukan Indonesia dalam melibatkan diri untuk membantu membentuk perdamaian yang terjadi terhadap konflik-konflik di Timur Tengah tidak hanya melalui komunikasi yang dilakukan kepada negara-negara yang berkonflik saja, namun Indonesia juga memanfaatkan pihak lainnya untuk mencari alternatif lainnya sebagai solusi penyelesaian konflik-konflik tersebut. Salah satu langkah yang diambil Indonesia sebagai salah satu alternatif dalam usahanya untuk membantu menyelesaikan konflik-konflik di Timur Tengah yaitu dengan memanfaatkan organisasi internasional.

Beberapa organisasi internasional yang digunakan Indonesia untuk menyampaikan saran serta menyuarakan tentang kepedulian Indonesia terhadap konflik-konflik yang terjadi di kawasan teluk tersebut ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Indonesia menganggap bahwa kedua organisasi ini memiliki peran yang penting serta dapat menjadi media untuk mendamaikan konflik-konflik yang terjadi. PBB merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap mewujudkan kedamaian dunia tentunya membuat organisasi ini memiliki kewajiban dalam mewujudkan perdamaian, termasuk juga di kawasan Timur Tengah. Selain itu OKI merupakan organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan solidaritas Islam antarnegara anggota juga seharusnya memiliki peran yang penting dalam meredakan konflik-konflik di kawasan tersebut. Stabilitas yang terganggu di kawasan Timur Tengah tersebut terjadi karena konflik yang terjadi diantara sesama anggota OKI, seperti Arab Saudi – Iran, krisis diplomatik Qatar, serta Suriah. Dengan begitu diharapkan bahwa OKI dapat membantu mendamaikan konflik

yang terjadi antara sesama anggotanya. Indonesia yang termasuk sebagai anggota didalam kedua organisasi tersebut juga dapat mengambil peran aktif, dengan mengajak serta mendorong kedua organisasi agar lebih aktif dalam mewujudkan perdamaian.

a. Organisasi Konferensi Islam

OKI (Organisasi Konferensi Islam) adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011.

Dalam konflik Arab Saudi dan Iran Salah setelah proses dari pranegosiasi berakhir dengan tidak baik, Indonesia menggunakan salah satu organisasi internasional yaitu Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk melanjutkan usahanya dalam mendamaikan kedua belah pihak. Dalam meredakan konflik antara Arab Saudi dan Iran di organisasi tersebut Indonesia mengajak negara-negara yang termasuk sebagai anggota OKI untuk ikut serta dan aktif dalam mendamaikan kedua pihak.

Kemudian Menteri Luar Negri Retno LP Marsudi telah menawarkan Arab Saudi dan Iran bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara mengajak negara-negara lain berpartisipasi untuk mencari cara penyelesaian yang baik dengan konferensi. Dalam hal ini OKI menjadi wadah untuk memfasilitasi dan mengumpulkan solusi dari negara-negara anggota yang termasuk juga Arab Saudi dan Iran, sehingga konflik dapat terselesaikan. Sebagai sesama anggota pemerintah

Indonesia berharap Dengan mengajak pihak-pihak lain tersebut Indonesia berharap akan ada lebih banyak solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI ke-13 di Istanbul, Turki, Pada 14-15 April 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mewakili Indonesia dalam KTT tersebut sependapat dengan pernyataan Erdogan yang berisi mendesak OKI mengakhiri perpecahan sektarian dalam komunitas Islam, Sementara, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyerukan pentingnya OKI dalam penyelesaian perbedaan dan konflik secara damai. Semua ini sesuai dengan semangat KTT yang bertemakan "Persatuan dan Solidaritas untuk Keadilan dan Perdamaian" (Kemenlu Indonesia, 2016).

Dalam melakukan upayanya untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi konflik yang terjadi di Suriah. Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang merupakan Organisasi Islam terbesar di dunia mengambil inisiatif untuk ikut serta menjadi bagian dari upaya mencari sebuah solusi untuk dapat mengakhiri konflik saudara di Negara Suriah. Sebagai langkah Kongret OKI berencana menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlangsung di Mekkah, Arab Saudi yang mana KTT ini yang akan di gelar membahas khusus mengenai konflik yang terjadi di Negara Suriah.

Hal ini merupakan sebuah upaya konkret yang dilakukan OKI, untuk mengakhiri konflik ini OKI melakukan langkah-langkah diantaranya adalah dengan mengirimkan tim peninjau ke Negara Suriah yang mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya hal ini bertujuan agar pemerintah Negara Suriah segera menghentikan kekerasan yang sedang terjadi, OKI juga menuntut Assad meninggalkan kekuasaan dan bersiap untuk memasuki masa transisi pasca- rezim Bashar al-Assad, OKI juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera membantu menyelesaikan konflik di Negara Suriah. Selain itu langkah OKI yang baru-baru ini diambil adalah mengadakan sebuah pertemuan darurat Komite Eksekutif yang mana pertemuan ini

adalah atas permintaan Negara Kuwait, hal ini dikarenakan semakin memburuknya situasi dan kondisi kemanusiaan di Kota Aleppo, Suriah.

Selain itu dalam upayanya untuk mencari jalan damai OKI juga mengusulkan agar melakukan dialog diantara warga Suriah, dan mendesak kelompok yang menentang Presiden Suriah Bashar Al Assad agar mau bertemu para pejabat pemerintah. Akan tetapi pihak pemerintah sendiri belum resmi memberikan pendapatnya. Untuk menindak lanjuti permasalahan konflik di Negara Suriah maka, OKI akhirnya menggelar KTT yang diadakan di Arab Saudi.

b. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations atau UN). Pengertian PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya mencakup hampir seluruh negara di dunia. Lembaga PBB ini dibentuk untuk memfasilitasi persoalan hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Dalam konflik Suriah pemerintah Indonesia juga memanfaatkan organisasi PBB ini sebagai salah satu media untuk menyampaikan pentingnya diwujudkan perdamaian di kawasan tersebut. Sebagai organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dunia internasional, Indonesia berharap dengan menyampaikan gagasan dan dorongan agar PBB dapat mampu lebih aktif lagi dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi.

Dalam konferensi Jenewa mengenai Suriah yang dilaksanakan oleh PBB di Montreux, Swiss. Pada saat itu menteri luar negeri Indonesia yaitu Marty Natalegawa menyampaikan tentang harapan bahwa pertemuan yang dilaksanakan agar dapat menghasilkan 3 output dalam menyelesaikan masalah dan mengakhiri bencana kemanusiaan di Suriah (Kemenlu Indonesia, 2018), yaitu:

1. Memastikan kembali penyelesaian politik yang komprehensif dan inklusif oleh rakyat Suriah sendiri dan tidak lagi melibatkan kekuatan militer. Penyelesaian yang langgeng dan menyeluruh hanya dapat dicapai melalui solusi politik dan kesepakatan yang dicapai diantara para pihak terkait di Suriah sendiri - dan didukung oleh masyarakat internasional. Suatu solusi yang memberikan suatu peta jalan yang memastikan dihargainya keinginan dari rakyat Suriah. Negara-negara, baik kawasan dan luar kawasan, harus bertindak bersama dan dalam satu kesatuan untuk mendesak adanya suatu solusi politik. Masyarakat internasional harus bertindak secara mendesak dan dengan tekad kuat, agar konflik bersenjata, ditengah situasi politik Suriah yang semakin kompleks dan terkotak-kotak, tidak terus berlanjut. Pihak-pihak yang terlibat konflik di Suriah harus didukung dengan insentif positif dan dorongan untuk berani memilih suatu penyelesaian politik. Masyarakat internasional harus membantu mempromosikan suatu iklim yang kondusif – dengan cara tegas dan bahkan agresif - yang dapat mendorong semua pihak kearah meja perundingan dan bukan medan perang. Masyarakat internasional harus memfasilitasi, bukan kearah pertumpahan darah dan konflik tak berujung, sebaliknya kearah terwujudnya dialog dan perundingan.

2. Memprioritaskan gencatan senjata untuk menghentikan tragedi kemanusiaan dan penderitaan pihak-pihak yang menjadi korban dalam konflik di Suriah. Hal tersebut saat ini harus menjadi prioritas utama. Hal itu adalah kunci jika penderitaan kemanusiaan yang terjadi akan dihentikan dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan dapat disalurkan. Dan, hal itu juga sangat diperlukan jika ingin tercipta ruang bagi bergulirnya proses politik yang inklusif pada tahapan yang paling dini dan tentatif sekalipun. Pertemuan hari ini harus mendorong dideklarasikannya penghentian kekerasan bersenjata dan menunjukkan bahwa masyarakat internasional siap untuk memastikan bahwa hal ini akan dipatuhi semua pihak.

3. Mempercepat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini dilakukan oleh semua pihak yang harus memastikan tidak adanya hambatan-hambatan terhadap penyaluran peningkatan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Kebutuhan dan kepentingan dari kelompok sipil yang telah lama menderita harus menjadi prioritas.

Pembicaraan untuk perdamaian konflik di Suriah ini tidak hanya melibatkan antara pemerintah dan masyarakat yang memberontak, namun juga negara-negara yang ikut campur dalam konflik tersebut sehingga sulit tercapai. Maka dari itu saat ini Indonesia hanya mampu untuk menyuarakan perdamaian dan meminta pihak yang terlibat untuk tidak memperburuk konflik.

IV. KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang sering menjadi pusat perhatian karena terjadinya banyak konflik-konflik di negara-negara dalam kawasan tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab atau faktor terjadinya konflik di kawasan ini, seperti minyak, air tawar, hingga agama. Minyak saat ini merupakan bahan energi utama yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Baik gas, bensin, pertamax, bensol, solar, aspal, minyak tanah, maupun ter, merupakan hasil minyak yang memiliki kegunaan baik untuk transportasi, industri, keperluan rumah tangga dan sebagainya. Sebagai sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui membuat minyak menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dapat memicu konflik.

Indonesia dan Timur Tengah memiliki hubungan yang dekat dengan sejarah yang panjang. Sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka, kedekatan telah terjalin baik dengan negara-negara di Timur Tengah. Berkat hal ini ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Salah satu negara besar di Timur Tengah yaitu Mesir menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Usaha Indonesia untuk memfasilitasi konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah merupakan sesuai dengan prinsip politik luar negerinya yaitu “Bebas-Aktif”. Indonesia berusaha aktif untuk berpartisipasi dan berperan dalam mewujudkan perdamaian dalam konflik yang terjadi di kawasan tersebut tanpa memihak pihak manapun. Langkah tersebut dilakukan oleh Indonesia dalam konflik Arab Saudi – Iran, Suriah, dan Qatar. Dalam konflik Arab Saudi – Iran, pemerintah Indonesia tidak memihak salah satu negara tersebut dan menawarkan diri untuk menjadi mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Konflik yang terjadi tersebut terbagi menjadi konflik *interstate* dan *intrastate*. Konflik *interstate* merupakan konflik antar negara yang memiliki perbedaan kepentingan, misalnya sistem ekonomi, sedangkan konflik *intrastate* merupakan konflik yang terjadi di dalam negara. Konflik Arab Saudi – Iran, dan Konflik Qatar termasuk sebagai konflik *interstate*, sedangkan konflik Suriah termasuk sebagai konflik *intrastate*. Dari perbedaan dalam tipe konflik yang terjadi tersebut sebelumnya diharapkan adanya perbedaan sikap Indonesia dalam menyikapi konflik yang terjadi. Namun faktanya Indonesia menerapkan kebijakan yang samad dalam setiap konflik-konflik yang tersebut.

Fasilitasi yang dilakukan Indonesia dalam konflik Arab Saudi – Iran, Suriah, dan Qatar menghadapi permasalahan yang berbeda-beda. Dalam konflik Arab Saudi-Iran Indonesia mendapatkan peran yang cukup penting, karena kedua negara tersebut memberikan respon baik terhadap tawaran Indonesia sebagai mediator terlebih lagi kedua pihak juga menyetujui untuk menyelesaikan konflik melalui jalur mediasi. Untuk selanjutnya peran Indonesia bisa berlanjut jika negosiasi dapat terwujud, namun sayangnya negosiasi tidak tercapai karena pihak yang terlibat beranggapan bahwa tujuan yang dinyatakan dalam tahap pranegosiasi tersebut belum tercapai.

Untuk konflik yang terjadi di Qatar dan Suriah pemerintah Indonesia memberikan sikap yang sama karena kondisi konflik di negara tersebut tidak seperti

Arab Saudi dan Iran. Indonesia hanya mampu memberikan suara dan dorongan terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk tidak mengambil keputusan yang dapat memperburuk keadaan. Peran Indonesia disini sangat terbatas karena pihak-pihak penting yang terlibat tersebut belum menunjukkan sikap yang menerima serta memanfaatkan posisi Indonesia dalam konflik tersebut.

Selain itu Indonesia juga menyatakan gagasan agar PBB dan OKI sebagai salah satu organisasi Internasional yang memiliki pengaruh besar mampu untuk berperan lebih aktif lagi dalam membantu untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah. Indonesia berharap dengan banyaknya yang terlibat dalam usaha untuk penyelesaian konflik tersebut mampu menghasilkan solusi yang dapat menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkonflik.

Indonesia memiliki modal besar yang setidaknya layak untuk diperhitungkan sebagai pihak ketiga yang berperan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Indonesia memang belum menjadi negara adidaya sekelas Amerika Serikat atau kini juga Tiongkok. Namun, Indonesia bersama Jepang, Korea Selatan, dan India telah diakui banyak negara lain dan para analis sebagai middle power, kekuatan menengah, yang memiliki peran penting sebagai "pengimbang" di tengah persaingan kian meningkat di antara AS beserta sekutunya dan Tiongkok (dan Rusia) bersama negara pendukungnya

Selain itu Indonesia juga dapat diterima oleh kedua pihak dengan berbagai faktor, yaitu sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia tentunya menjadi poin lebih yang tidak dimiliki oleh negara lainnya, hubungan kerjasama Kemudian Indonesia memiliki hubungan baik dengan berbagai negara di kawasan Timur Tengah memberikan peluang poin lebih bagi Indonesia. Bentuk Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif dapat terealisasi secara jelas dalam konflik ini, karena sebagai mediator Indonesia harus mampu menengahi dan memberikan solusi yang damai untuk kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2016, Januari 12). *Indonesia dan Mediasi Konflik Arab Saudi-Iran*. Retrieved from kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/15000071/Indonesia.dan.Mediasi.Konflik.Arab.Saudi-Iran?page=all>
- Fatmawati, N. I. (2017, April 10). *Guru Besar UI: Indonesia Ambil Sikap Tepat atas Konflik AS-Suriah*. Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-3469810/guru-besar-ui-indonesia-ambil-sikap-tepat-atas-konflik-as-suriah>
- Jatmika, S. (2014). *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Maharsa.
- Kemenlu Indonesia. (2016). *Konferensi Tingkat Tinggi ke-13 Organisasi Kerja Sama Islam*. Retrieved from KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA:
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Konferensi-Tingkat-Tinggi-ke-13-Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx>
- Kemenlu Indonesia. (2016). *Pesan Damai Presiden RI Kepada Iran dan Arab Saudi*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia:
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/pesan-damai-indonesia-arab-saudi.aspx>,
- Kemenlu Indonesia. (2017, Juni 15). *Menlu Retno Terima Utusan Khusus UEA Bahas Krisis Qatar*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Indonesia:
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-Terima-Utusan-Khusus-UEA-Bahas-Krisis-Qatar.aspx>
- Kemenlu Indonesia. (2018). *“PERNYATAAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA KONPERENSI JENEWA MENGENAI SURIAH*. Retrieved from
<https://www.kemlu.go.id/Documents/Geneva%20II%20on%20Syria/Pernyataan%20Geneva%202%20terjemahan.pdf>,
- Kemenlu Indonesia. (n.d.). *Sejarah Hubungan Indonesia Mesir*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri: <https://www.kemlu.go.id/Cairo/id//Pages/Mesir.aspx>
- Kompasiana. (2016). *Memahami Konflik*. Retrieved from Kompasiana:
<https://www.kompasiana.com/majapahitnews/552c6e8a6ea834ae1f8b4573/memahami-konflik>
- Muhaimin. (n.d.). *Saudi Cs dan Qatar Perang Diplomatik, Ini Sikap Indonesia*. Retrieved from Sindo News: <https://international.sindonews.com/read/1211187/40/saudi-cs-dan-qatar-perang-diplomatik-ini-sikap-indonesia-1496736354>
- Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall. (2005). *Contemporary Conflict Resolution*. 64.

Stein, J. G. (1989). Getting to the table: processes of international prenegotiation. 231-236.

Yuniati, N. (2017, April 7). *Indonesia Kecam Serangan Amerika ke Suriah*. Retrieved from KBR: https://kbr.id/nasional/04-2017/indonesia_kecam_serangan_amerika_ke_suriah/89626.html

Arab Saudi eksekusi mati ulama Syiah. (2016, Januari 2). Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160102_dunia_arabsaudi_eksekusi

Debora, Y. (2017, Juni 8). *Rekam Jejak Retaknya Hubungan Qatar dan GCC*. Retrieved from <https://tirto.id/rekam-jejak-retaknya-hubungan-qatar-dan-gcc-cqgu>

Leifer, M. (1983). *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta